80

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KEHUTANAN MENUJU PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Dudung Darusman
(Guru Besar Madya dan Kepala Lab. Poleksos Kehutanan Fahutan IPB)

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Pembenahan Pembangunan Kehutanan Indonesia Secara Holistik Menuju Sustainable Forest Management", diselenggarakan oleh PC Slylva Indonesia-IPB, tanggal 13 Nopember 1999 di Kampus IPB Darmaga Bogor

PENGANTAR

Sesungguhnya sebagai seorang akademisi, saya merasa agak bosan dan jera menyampaikan saran pemikiran kepada kalangan pemerintah dan swasta, karena telah cukup banyak saran-saran pemikiran yang telah disampaikan, yakni pada berbagai kesempatan diskusi dan seminar, bahkan topiknya seringkali diulang-ulang. Sekalipun telah menjadi kesimpulan, toh pelaksanaan atau tindak- lanjutnya tidak dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Bila setelah berjalan waktu tidak ada kemajuan, maka seolah-olah saran dan pemikirannya yang salah dan kembali lagi meminta saran pemikiran baru.

Sesungguhnya pula saya cenderung bersikap lihat-lihat dulu siapa jajaran pemerintah dan swasta nanti yang akan berperan, adakah perubahan akan terjadi atau masih seperti yang dulu. Walaupun begitu kepada forum Sylva Indonesia saya tidak boleh bosan dan jera, karena kepada generasi peneruslah saya berharap banyak, untuk menerapkan profesi kehutanan dengan baik dan sungguh-sungguh.

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KEHUTANAN

Kelestarian hutan memang pada pokoknya adalah persoalan manajemen hutan, tapi sekalipun manajemen hutannya telah dilaksanakan dengan baik belum tentu dapat menjamin kelestarian hutan, apabila (diantaranya) tidak memenuhi harapan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat yang terkait dengan sumberdaya hutan tersebut.

Boleh dikatakan bahwa kerusakan hutan yang terjadi pada masa lalu dan sekarang ini bukanlah karena kelemahan manajemen hutannya, tapi karena gangguan perusakan akibat tidak terpenuhinya harapan-harapan tersebut. Hutan yang baik telah dirambah, dicuri, dibakar dan ludes karena ketidak-puasan ekonomi, sosial dan politik yang terus-menerus, yang dirasakan masyarakat sekitarnya.

Masyarakat, dengan sebidang hutan di depannya, ingin hidup sejahtera (ekonomi), aman tenteram (sosial) dan berperan/menjadi tuan di negerinya sendiri (politik). Secara lebih jelasnya harapan masyarakat tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Memperoleh ***kesempatan kerja***, yang dapat memberi arti bagi kehidupannya karena memberi kesempatan untuk mengekspresikan kemampuannya dan merasa berguna, sehingga memiliki harga diri. Ahli filsafat menyatakan bahwa bila ingin memberi kebahagiaan, berilah orang pekerjaan.

b. Memperoleh ***pendapatan*** (*income*), yakni yang berasal dari upah/gaji, yang memberi kekuatan untuk membeli (daya beli), dan kemudian mengkonsumsi barang dan jasa yang diperlukannya, sehingga merasakan kesejahteraan. Bahkan dari pendapatan itu pula, mereka dapat menabung untuk membina sumber-sumber pendapatan lain yang lebih besar.

c. Memperoleh kesempatan ***berusaha***, yang dianggap mempunyai derajat yang lebih tinggi, karena tidak hanya untuk diri/keluarganya sendiri tapi juga untuk sesamanya yang lebih banyak.

d. Memperoleh ***transfer*** ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan untuk semakin maju lagi di kemudian hari.

Berdasarkan harapan-harapan masyarakat tersebut, maka kata kunci langkah perbaikannya adalah "***pemberdayaan masyarakat***" sekitar hutan. Namun, pemberdayaan masyarakat seperti apa ? Apakah membagi-bagi areal hutan kepada masyarakat seperti yang keras dituntut akhir-akhir ini ? Mungkin itu terlalu sempit dan berbahaya, baik untuk kepentingan profesi kehutanan, maupun untuk mereka sendiri.

Jadi pemberdayaan masyarakat itu harus di satu sisi ***meningkatkan kesejahteraan*** masyarakat yang berkelanjutan, dan di sisi yang lain tetap ***menjaga kelestarian*** sumberdaya hutannya.

Untuk memenuhi kedua syarat penting tersebut, masih terbuka luas pilihan **bentuk/cara** pemberdayaan masyarakat, yakni melalui berbagai macam keterlibatannya dalam kegiatan usaha kehutanan, sebagai berikut :

1. Terlibat langsung dalam kegiatan usaha pokok, yang dapat melalui cara-cara :

   a. Sebagai ***buruh*** atau ***pegawai*** perusahaan
   b. Sebagai ***pimpinan***/pengelola perusahaan
   c. Sebagai ***pemilik*** perusahaan
   d. Sebagai ***pemegang saham***
   e. Sebagai ***pengontrak/pemborong*** bahagian pekerjaan

2. Tidak telibat secara langsung dengan usaha yang pokok, yakni kegiatan usaha penyedia input dan pengguna lebih lanjut output kegiatan usaha pokok tersebut Bentuk dan caranya sama saja dengan no. 1 di atas, yakni sebagai buruh, pegawai, pimpinan, pemilik usaha, pemegang saham, dan pemborong pekerjaan. Apabila dibuka, kesempatannya akan lebih besar dibandingkan keterlibatan secara langsung.

3. Tidak terlibat tapi memperoleh kesejahteraan dengan memanfaatkan ***pelayanan fasilitas umum*** yang dibuat pemerintah dengan sumber dana dari kegiatan usaha pokok, seperti : royalty, retribusi, pajak, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut.

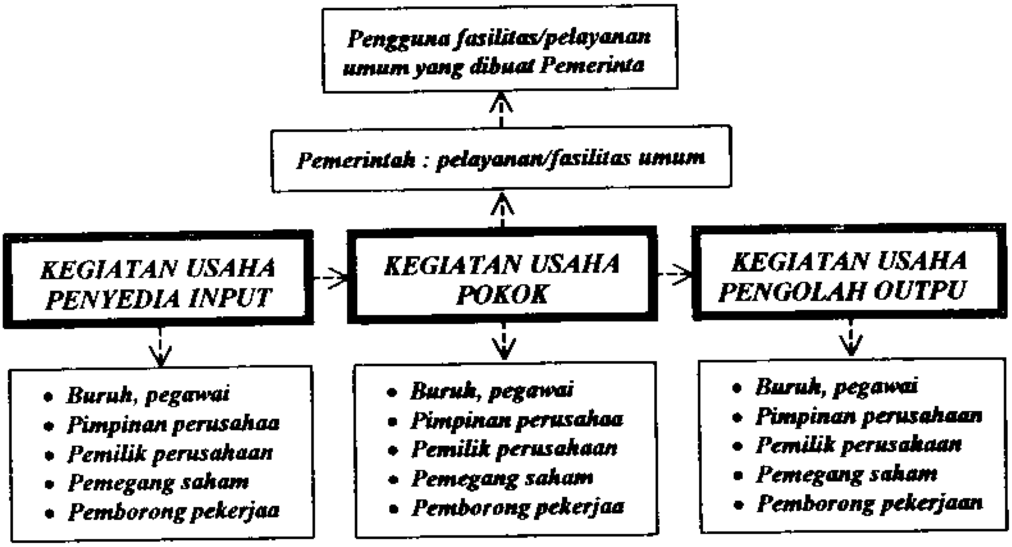

Jadi langkah-langkah yang harus segera ditempuh adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk ikut berperan melalui bentuk/cara yang beragam tersebut di atas, dan tidak terbatas pada bentuk/cara yang selama ini ada, yang terutama sebagai buruh/pegawai.

Dalam hal kepada siapa kesempatan yang luas tersebut akan diberikan, hendaknya kepada seluruh masyarakat yang mempunyai potensi bekerja dan berusaha, dan tidak harus dibatasi secara diskriminatif. Pelaku ekonomi hendaknya cukup banyak sehingga mendorong suasana pasar yang kompetitif, yang akan merangsang peningkatan efisiensi, yang selama ini sangatlah rendah. Pelaku ekonomi hendaknya juga mempunyai variasi yang banyak dan lengkap, seperti terlihat pada matriks berikut.

Tabel 24. *Hubungan Antara Skala Usaha dan Bentuk Badan Usaha*

Skala Usaha	**Bentuk Usaha**					**%**
	Perorangan	**CV**	**PT**	**BUMN BUMD**	**Koperasi**	
Besar	?	✓	✓	✓	✓	–
Menengah	✓	✓	✓	✓	✓	–
Kecil	✓	✓	✓	?	?	–
%	–	–	–	–	–	100

Langkah perbaikan dalam pemberian kesempatan usaha seharusnya mengoreksi kekurangan masa lalu yang mengutamakan kesempatan kepada pengusaha skala besar atau membuka peluang terbentuknya pengusaha skala besar dan mematikan yang skala menengah dan kecil, serta menganak-emaskan bentuk usaha tertentu, misalnya koperasi.

Terwujudnya beragam ukuran dan bentuk usaha diharapkan akan menumbuhkan suasana kompetisi sehat yang akan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan ketangguhan ekonomi kehutanan di Indonesia secara keseluruhan, karena dapat menangkap semua peluang usaha produksi dan pemasarannya. Dapat diibaratkan menangkap aliran air sungai, apabila hanya dengan batu-batu besar saja air akan tetap lolos, dengan batu-batu menengah mungkin batunya akan goyah dan hanyut, apalagi dengan batu yang kecil/pasir, baru ditaruh saja langsung hanyut. Jadi diperlukan adanya batu besar menengah dan kecil secara bersama-sama.

Demikian juga dalam hal bentuk batu, apabila bentuk bulat semua akan ada celah yang tidak dapat tersumbat. Oleh karena itu diperlukan bentuk yang bersudut dan bentuk-bentuk lainnya secara bersama-sama. Demikianlah maka diperlukan berbagai bentuk usaha dalam kehutanan.

PENUTUP

Langkah-langkah perbaikan pembangunan kehutanan di bidang ekonomi sudah sangat *urgent*, dan diharapkan dapat berperan penting dalam mengembalikan kelestarian sumberdaya hutan dan manfaatnya. Pada dasarnya langkah yang dimaksud adalah langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua bentuk dan skala usaha untuk ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan usaha pokok kehutanan.

Bersamaaan dengan itu, perlu pula dibuat langkah-langkah perluasan dan penggalian jenis-jenis usaha pokok kehutanan yang baru, yang tidak hanya terbatas pada produk kayu, tapi juga non-kayu dan manfaat-manfaat barang dan jasa lainnya, yang sangat terbuka pilihannya di kehutanan.